



Judul : Pembahasan RUU DKJ Mesti Libatkan Partisipasi Politik
Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

DAERAH KHUSUS JAKARTA

Pembahasan RUU DKJ Mesti Libatkan Partisipasi Publik

ANGGOTA Badan Legislasi DPR Hermanto meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dilakukan dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik dan tidak terburu-buru, khususnya saat membahas pasal-pasal kontroversial.

"Pendapat publik harus kita serap. Jangan sampai pembahasan RUU DKJ ini sekadar cepat selesai. Kita juga perlu mengantisipasi agar tidak ada masyarakat yang anti atau menolak terhadap RUU ini," kata Hermanto.

Senada, anggota DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya tidak ingin membahas RUU DKJ dengan tergesa-gesa. Dia pun meng-

ingatkan pemerintah agar jangan mendesak legislatif untuk mengambil keputusan terkait dengan RUU tersebut dalam waktu dekat.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Gusparidi Gaus juga sepakat pembahasan pasal-pasal kontroversial dilakukan secara cermat dan mendengar sejumlah masukan. Namun, ia tetap berharap pembahasan RUU itu dapat selesai pada Masa Sidang IV Maret hingga April nanti.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, dalam RUU DKJ, gubernur akan tetap dipilih rakyat. Akan tetapi, pasal soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden tidak akan dicabut dalam RUU tersebut.

Tito menerangkan pemerintah dan tim yang terdiri atas para pakar telah menyepakati perlunya kawasan aglomerasi sebagai upaya harmonisasi perencanaan dan evaluasi secara reguler untuk Jakarta dan sekitarnya.

Dalam sinkronisasi aglomerasi itu, imbuhnya, perlu peran dari presiden atau wapres. "Kita melihat presiden memiliki tanggung jawab nasional yang luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani wapres."

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mencium bau amis dari penentuan otoritas Dewan Kawasan Aglomerasi yang diberikan kepada wapres. "Bisa jadi ada kepentingan bisnis masa depan yang

Materi Muatan Utama RUU DKJ

- Kekhususan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.
- Pengaturan untuk mengatasi permasalahan di Jakarta dan wilayah sekitarnya.
- Menyinergikan antardaerah penunjang.
- Usul inisiatif kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Proses Pengesahan RUU DKJ

- RUU DKJ diajukan oleh pemerintah kepada DPR.
- RUU DKJ dibahas di Badan Legislasi (Balleg) DPR.
- Pada 6 Desember 2023, RUU DKJ disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI.
- Setiap fraksi di DPR memberikan pandangan dan suara terkait dengan RUU DKJ.
- Jika RUU DKJ mendapatkan dukungan mayoritas, akan dilakukan pengesahan dan menjadi undang-undang setelah ditandatangani presiden.
- Setelah pengesahan, RUU DKJ diimplementasikan oleh pemerintah dan berlaku di wilayah Daerah Khusus Jakarta.



Sumber: DPR RI/Elang M

besar sekali ini. Wajib kita kawal bersama," kata Mardani dalam keterangan tertulis, kemarin.

Terpisah, politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai wewenang tambahan yang diberikan kepada wapres akan menyebabkan

banyak anggaran mubazir. Selain itu, kata dia, beleid yang tercantum pada Pasal 55 RUU DKJ itu sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik. "Oleh karena itu, wewenang tambahan bagi wapres seharusnya ditolak." (Mal/Dis/Teo/Van/Ykb/Ind/X 3)